Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Vol 3 (3) 2026 : 639-659

THE ETHICS OF QUR'ANIC INTERPRETATION THROUGH AL-'AQL AL-MU'AYYAD: A RECONSTRUCTION OF ṬĀHĀ 'ABD AL-RAḤMĀN'S THOUGHT

ETIKA INTERPRETASI AL-QUR'AN MELALUI AL-'AQL AL-MU'AYYAD: REKONSTRUKSI PEMIKIRAN ṬĀHĀ 'ABD AL-RAḤMĀN

Zakiah[1], Asmuni[2]
Program Studi S2 Hukum keluarga Islam,Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia[1,2]
zakiahazis@gmail.com, asmuni@uii.ac.id

**Corresponding Author*

ABSTRACT
Qur'anic interpretation is concerned not only with the ability to understand the text but also with the interpreter's responsibility for constructing knowledge, considering values, and actualizing the message of revelation in human life. This issue has become increasingly important in the development of contemporary Qur'anic studies, as interpretation takes place within the dynamic relationship between the text, the interpreter, the historical context, and constantly changing social realities. This article aims to analyze the concept of al-'aql al-mu'ayyad in the thought of Ṭāhā 'Abd al-Raḥmān and reconstruct it as a conceptual foundation for the ethics of Qur'anic interpretation. This study employs library research using a philosophical-conceptual approach. Primary and secondary sources are analyzed to identify the epistemological, ethical, spiritual, and practical characteristics of al-'aql al-mu'ayyad and subsequently relate them to the issue of the interpreter's responsibility. The findings indicate that al-'aql al-mu'ayyad does not regard rationality as an autonomous intellectual capacity but rather integrates it with practice, experience, values, and self-cultivation. Based on these characteristics, this study reconstructs three dimensions of interpretive ethics: epistemic responsibility, ethical responsibility, and spiritual-practical responsibility. These three dimensions constitute an integrative framework that positions the interpreter not merely as a producer of meaning but as a moral agent accountable for the foundations of knowledge, value orientations, and the consequences of their interpretations. The novelty of this study does not lie in creating a new theory of Qur'anic interpretation attributed to Ṭāhā, but rather in the conceptual reconstruction of al-'aql al-mu'ayyad as a normative-interpretive ethical framework for the accountability of the subject engaged in Qur'anic interpretation.
Keywords: al-'aql al-mu'ayyad; Ṭāhā 'Abd al-Raḥmān; Qur'anic interpretation; interpretive ethics; normative-interpretive ethics; Islamic philosophy.

ABSTRAK
Interpretasi Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami teks, tetapi juga menyangkut tanggung jawab penafsir dalam membangun pengetahuan, mempertimbangkan nilai, dan mengaktualisasikan pesan wahyu dalam kehidupan. Persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam perkembangan studi Al-Qur'an kontemporer karena interpretasi berlangsung dalam hubungan antara teks, penafsir, konteks historis, dan realitas sosial yang terus berubah. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep al-'aql al-mu'ayyad dalam pemikiran Ṭāhā 'Abd al-Raḥmān dan rekonstruksinya sebagai landasan konseptual bagi etika interpretasi Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis-konseptual. Sumber primer dan sekunder dianalisis untuk mengidentifikasi karakter epistemologis, etis, spiritual, dan praksis dari *al-'aql al-mu'ayyad*, kemudian menghubungkannya dengan persoalan tanggung jawab penafsir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-'aql al-mu'ayyad tidak menempatkan rasionalitas sebagai kemampuan intelektual yang berdiri sendiri, tetapi menghubungkannya dengan praktik, pengalaman, nilai, dan pembentukan diri. Berdasarkan karakter tersebut, penelitian rekonstruksi tiga dimensi etika interpretasi, yaitu tanggung jawab epistemik, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab spiritual-praksis. Ketiga dimensi tersebut membentuk kerangka integratif yang menempatkan penafsir bukan hanya sebagai produsen makna,

Copyright © 2024 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

tetapi sebagai subjek moral yang bertanggung jawab atas dasar pengetahuan, orientasi nilai, dan konsekuensi interpretasinya. Kebaruan penelitian tidak terletak pada penciptaan teori tafsir baru yang dinisbatkan kepada Ṭāhā, melainkan pada rekonstruksi konseptual al-'aql al-mu'ayyad sebagai kerangka etika normatif-interpretatif bagi akuntabilitas subjek interpretasi Al-Qur'an.
Kata Kunci: al-'aql al-mu'ayyad; Ṭāhā 'Abd al-Raḥmān; interpretasi Al-Qur'an; etika interpretasi; etika normatif-interpretatif; filsafat Islam.

1. PENDAHULUAN

Interpretasi Al-Qur'an selalu berlangsung dalam pertemuan antara teks, penafsir, dan realitas kehidupan. Al-Qur'an hadir dalam konteks historis tertentu, tetapi pesan dan nilai yang dikandungnya terus dibaca oleh manusia dalam kondisi sosial yang berbeda. Perubahan konteks tersebut menyebabkan aktivitas interpretasi tidak dapat dipahami sebagai proses sederhana untuk memindahkan makna masa lalu ke masa kini. Penafsir harus berhadapan dengan persoalan mengenai bahasa, sejarah, konteks, tujuan moral, dan kebutuhan manusia yang terus berubah. Dalam perkembangan studi tafsir kontemporer, kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai pendekatan yang berusaha mempertemukan makna tekstual dengan konteks historis dan realitas pembaca.

Pendekatan kontekstual merupakan salah satu perkembangan penting dalam studi tersebut. Dalam pendekatan ini, pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak hanya diarahkan pada makna literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial-historis pewahyuan dan konteks pembaca masa kini. Abdullah Saeed, misalnya, mengembangkan pendekatan kontekstual yang memberikan perhatian terhadap ayat-ayat etika-hukum dan berusaha mempertemukan pesan Al-Qur'an dengan kondisi masyarakat kontemporer.[1] Pendekatan demikian memperlihatkan bahwa interpretasi Al-Qur'an bukan aktivitas yang sepenuhnya terpisah dari perubahan sosial.

Fazlur Rahman menawarkan pendekatan yang juga memberikan perhatian terhadap dimensi moral dan konteks historis. Melalui gagasan *double movement*, Rahman mengembangkan gerakan interpretatif dari persoalan kontemporer menuju konteks historis pewahyuan untuk menemukan prinsip moral umum, kemudian membawa prinsip tersebut kembali kepada persoalan kontemporer.[2] Pendekatan ini menegaskan bahwa penafsiran tidak cukup dilakukan dengan mengulang bentuk literal suatu ketentuan, tetapi membutuhkan usaha memahami orientasi moral yang mendasari pesan Al-Qur'an.

Sementara itu, Nasr Ḥāmid Abū Zayd memberikan perhatian besar terhadap hubungan antara teks, bahasa, sejarah, dan kebudayaan. Pendekatannya menegaskan bahwa aktivitas memahami teks merupakan aktivitas manusia yang selalu berlangsung dalam kondisi historis tertentu.[3] Dengan demikian, penafsir tidak pernah hadir dalam ruang kosong. Ia membawa horizon pengetahuan, pengalaman, bahasa, dan lingkungan sosial tertentu ke dalam proses interpretasi.

Perkembangan pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa studi Al-Qur'an kontemporer telah memberikan perhatian yang semakin besar terhadap persoalan konteks dan posisi penafsir. Namun, persoalan lain masih membutuhkan pengembangan, yaitu etika subjek yang melakukan interpretasi. Penafsir bukan sekadar pengguna metode. Ia merupakan subjek yang menentukan bagaimana metode digunakan, sumber apa yang dipilih, bagaimana suatu argumen dibangun, serta bagaimana hasil interpretasi digunakan dalam kehidupan.

---

[1] Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12, no. 1 (2011): 159–180, https://doi.org/10.14421/esensia.v12i1.707.

[2] Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 5–7.

[3] Nasr Ḥāmid Abū Zayd, *Critique of Religious Discourse*, trans. Jonathan Wright (New Haven: Yale University Press, 2006), 1–10.

Persoalan tersebut penting karena interpretasi Al-Qur'an memiliki konsekuensi normatif. Interpretasi dapat memengaruhi cara masyarakat memahami kewajiban keagamaan, relasi sosial, hukum keluarga, gender, keadilan, hubungan antarkelompok, maupun tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, kualitas interpretasi tidak cukup dinilai hanya dari kecanggihan metodologinya. Diperlukan pula pertanyaan mengenai integritas penafsir, orientasi nilai yang bekerja dalam proses interpretasi, dan konsekuensi sosial dari makna yang dihasilkan.

Dalam konteks inilah pemikiran Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān menjadi relevan. Filsuf Maroko tersebut mengembangkan kritik terhadap bentuk rasionalitas yang dipisahkan dari etika dan praktik. Rasionalitas, dalam konstruksi pemikirannya, tidak semata-mata merupakan kemampuan abstraksi dan penalaran teoritis, tetapi berkaitan dengan tindakan, pengalaman, pembentukan diri, dan orientasi spiritual.

Salah satu konsep penting dalam pemikirannya adalah al-ʻaql al-mu'ayyad. Konsep tersebut merupakan bagian dari pembagian tingkatan rasionalitas yang mencakup al-ʻaql al-mujarrad, al-ʻaql al-musaddad, dan al-ʻaql al-mu'ayyad. Harald Viersen menjelaskan bahwa ketiga bentuk tersebut dapat dipahami sebagai abstracted reason, guided reason, dan supported reason. Bentuk terakhir memiliki karakter yang lebih integratif karena tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjelaskan realitas secara abstrak, tetapi juga dengan pengalaman, praktik, dan pemahaman terhadap dimensi internal suatu realitas.[4]

Dengan demikian, al-ʻaql al-mu'ayyad tidak tepat dipahami semata-mata sebagai "akal yang lebih tinggi" dalam arti kemampuan intelektual. Ia menunjukkan bentuk rasionalitas yang menghubungkan pengetahuan dengan praktik dan pembentukan manusia. Rakhmat menunjukkan bahwa pemikiran Ṭāhā berusaha menghubungkan teori, praksis, dan pengalaman hidup dalam kerangka etika Islam.[5] Viersen juga menunjukkan hubungan *supported reason* dengan praktik sufistik dan proses pembentukan diri.[6]

Perspektif tersebut menarik untuk dibawa ke dalam studi etika interpretasi Al-Qur'an. Jika rasionalitas penafsir hanya dipahami sebagai kemampuan linguistik, logis, dan metodologis, maka aspek pembentukan moral subjek dapat terabaikan. Sebaliknya, apabila rasionalitas ditempatkan dalam hubungan dengan praktik, nilai, dan pengalaman, maka aktivitas interpretasi dapat dipahami sebagai praktik pengetahuan yang memiliki konsekuensi etis.

Kajian mengenai pemikiran Ṭāhā telah berkembang dalam berbagai arah. Muhammad Iqbal membahas konsep iʻtimāniyya sebagai bagian dari proyek pemikiran Ṭāhā dalam menghadapi problem modernitas.[7] Nurul Ihsannudin membahas hubungan hadis akhlak dengan filsafat etika Ṭāhā dan kritiknya terhadap rasionalisme modern.[8] Rakhmat mengkaji

---

[4] Harald Viersen, "The Modern Mysticism of Taha Abderrahmane," in *Islamic Ethics and the Trusteeship Paradigm: Taha Abderrahmane's Philosophy in Comparative Perspectives*, ed. Mohammed Hashas and Mutaz al-Khatib (Leiden: Brill, 2020), 170–194, https://doi.org/10.1163/9789004438354_010.

[5] Aulia Rakhmat, "Religion and Reason in Contemporary Islamic Ethics: A Comparative Study of Syed Muhammad Naquib al-Attas and Taha Abderrahmane Thought," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 2 (2023): 134–151, https://doi.org/10.32350/jitc.132.09.

[6] Harald Viersen, "The Modern Mysticism of Taha Abderrahmane," in *Islamic Ethics and the Trusteeship Paradigm: Taha Abderrahmane's Philosophy in Comparative Perspectives*, ed. Mohammed Hashas and Mutaz al-Khatib (Leiden: Brill, 2020), 170–194, https://doi.org/10.1163/9789004438354_010.

[7] Muhammad Iqbal, "Konsep I'timaniya dalam Pandangan Taha Abdurrahman," Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2023), https://doi.org/10.24235/jy.v9i1.12891.

[8] Nurul Ihsannudin, "Hadis Akhlak dan Filsafat Etika Taha Abdurrahman: Kritik Modernitas dan Tawaran Alternatif," *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2023), https://doi.org/10.14421/ref.v23i1.3968.

hubungan agama dan rasionalitas dalam etika Islam kontemporer dengan memberikan perhatian terhadap pemikiran Ṭāhā.[9] Viersen menguraikan hubungan *al-‘aql al-mu’ayyad* dengan mistisisme modern, pengalaman spiritual, dan praktik.[10] Harvey membahas nilai-nilai Qur’ani dan modernitas melalui dialog antara Ṭāhā dan Fazlur Rahman.[11] Rohmanu dan Rofiah juga mengkaji kontribusi filosofis Ṭāhā dalam pengembangan *ethical maqāṣid*.[12] Selain itu, Farid Suleiman melakukan studi kritis terhadap filsafat Taha Abderrahman secara umum.[13]

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa al-‘aql al-mu’ayyad dan pemikiran etika Ṭāhā telah dibahas dari perspektif rasionalitas, etika, spiritualitas, kritik modernitas, maqāṣid, dan nilai-nilai Qur’ani. Karena itu, penelitian ini tidak mengajukan klaim bahwa konsep tersebut belum pernah diteliti.

Celah penelitian (research gap) yang menjadi perhatian artikel ini lebih spesifik. Literatur yang tersedia telah menjelaskan dimensi rasional, etis, spiritual, dan praksis dalam pemikiran Ṭāhā, tetapi hubungan konseptual antara karakter al-‘aql al-mu’ayyad dan akuntabilitas subjek interpretasi Al-Qur’an** belum dikembangkan secara sistematis sebagai **kerangka etika normatif-interpretatif. Dengan demikian, pertanyaan penelitian tidak diarahkan pada apakah Ṭāhā memiliki teori tafsir, melainkan pada bagaimana karakter rasionalitas yang dikembangkannya dapat direkonstruksi untuk menjelaskan tanggung jawab penafsir.

Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep al-‘aql al-mu’ayyad dalam pemikiran Ṭāhā ‘Abd al-Raḥmān dan merekonstruksinya sebagai landasan konseptual bagi etika interpretasi Al-Qur’an. Analisis diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu tanggung jawab epistemik, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab spiritual-praksis.

Kebaruan penelitian ini perlu ditegaskan secara proporsional. Artikel ini tidak menyatakan bahwa Ṭāhā secara eksplisit merumuskan suatu “teori etika interpretasi Al-Qur’an” dengan tiga kategori tersebut. Tiga dimensi tersebut merupakan hasil rekonstruksi analitis penelitian berdasarkan karakter *al-‘aql al-mu’ayyad*, pemikiran etika Ṭāhā, dan gagasannya mengenai hubungan wahyu, akal, praktik, dan pembentukan manusia.

Dengan posisi tersebut, penelitian ini berusaha memperluas fungsi konseptual al-‘aql al-mu’ayyad: dari pembahasan mengenai tingkatan rasionalitas menjadi kerangka reflektif untuk menilai bagaimana penafsir memperoleh pengetahuan, menggunakan otoritas interpretatif, mempertimbangkan nilai, dan mengaktualisasikan hasil interpretasinya.

---

[9] Aulia Rakhmat, “Religion and Reason in Contemporary Islamic Ethics: A Comparative Study of Syed Muhammad Naquib al-Attas and Taha Abderrahmane Thought,” *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 2 (2023): 134–151, https://doi.org/10.32350/jitc.132.09.

[10] Harald Viersen, “The Modern Mysticism of Taha Abderrahmane,” in *Islamic Ethics and the Trusteeship Paradigm: Taha Abderrahmane’s Philosophy in Comparative Perspectives*, ed. Mohammed Hashas and Mutaz al-Khatib (Leiden: Brill, 2020), 170–194, https://doi.org/10.1163/9789004438354_010.

[11] Ramon Harvey, “Qurʾanic Values and Modernity in Contemporary Islamic Ethics: Taha Abderrahmane and Fazlur Rahman in Conversation,” in *Islamic Ethics and the Trusteeship Paradigm: Taha Abderrahmane’s Philosophy in Comparative Perspectives*, ed. Mohammed Hashas and Mutaz al-Khatib (Leiden: Brill, 2020), 150–169, https://doi.org/10.1163/9789004438354_009.

[12] Abid Rohmanu and Khusniati Rofiah, “Ṭāhā ‘Abd al-Raḥmān’s Philosophical Contribution to Theorize Ethical Maqāṣid,” *Al-Ahkam* 33, no. 2 (2023): 191–212, https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17527.

[13] Farid Suleiman, “The Philosophy of Taha Abderrahman: A Critical Study,” *Die Welt des Islams* 61, no. 1 (2021): 39–71, https://doi.org/10.1163/15700607-00600A10.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis-konseptual. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengidentifikasi struktur pemikiran Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān mengenai rasionalitas, etika, praktik, spiritualitas, dan *trusteeship paradigm*. Pendekatan konseptual digunakan untuk menghubungkan karakter tersebut dengan persoalan etika interpretasi Al-Qur'an. Secara operasional, pendekatan filosofis-konseptual dalam penelitian ini mencakup analisis konseptual (*conceptual analysis*) terhadap makna dan relasi antar-konsep dalam pemikiran Ṭāhā, serta rekonstruksi konseptual (*conceptual reconstruction*) yang bertujuan mengembangkan kerangka baru dari konsep yang sudah ada tanpa mengklaim bahwa kerangka tersebut secara eksplisit dirumuskan oleh tokoh.

Sumber primer penelitian terdiri atas karya Ṭāhā yang berkaitan dengan rasionalitas, etika, agama, dan praktik, terutama *al-ʻAmal al-Dīnī wa Tajdīd al-ʻAql* serta karya-karya yang berkaitan dengan filsafat etika dan *al-iʻtimāniyyah*. Sumber sekunder berupa buku dan artikel akademik yang membahas pemikiran Ṭāhā, *al-ʻaql al-mu'ayyad*, *trusteeship paradigm*, etika Islam, dan interpretasi Al-Qur'an kontemporer.

Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi langsung dengan fokus penelitian dan keterlacakan akademik. Sumber sekunder digunakan bukan sebagai pengganti sumber primer, tetapi sebagai alat untuk memahami, menguji, dan menempatkan pemikiran Ṭāhā dalam diskursus yang lebih luas.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. *Pertama*, identifikasi konseptual terhadap pengertian dan karakter *al-ʻaql al-mu'ayyad* serta hubungannya dengan bentuk rasionalitas lain. *Kedua*, analisis hubungan antara rasionalitas, praktik, etika, pengalaman, dan pembentukan diri. *Ketiga*, dialog kritis dengan pendekatan interpretasi Al-Qur'an kontemporer, khususnya pemikiran Fazlur Rahman, Nasr Ḥāmid Abū Zayd, dan Abdullah Saeed. *Keempat*, rekonstruksi konseptual dengan mengembangkan tiga dimensi etika interpretasi: tanggung jawab epistemik, etis, dan spiritual-praksis.

Rekonstruksi tersebut merupakan hasil analisis penelitian dan tidak dinisbatkan sebagai model yang secara eksplisit dirumuskan Ṭāhā sebagai metode tafsir. Pembedaan ini penting untuk menjaga ketepatan atribusi akademik. Selain itu, istilah **"kerangka etika normatif-interpretatif"** digunakan untuk menegaskan bahwa penelitian ini berada dalam wilayah etika normatif yang diterapkan pada praktik interpretasi, bukan metaetika yang membahas status ontologis atau epistemik pernyataan moral.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Rasionalitas dalam Pemikiran Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān

Konsep *al-ʻaql al-mu'ayyad* perlu dipahami dalam kerangka pemikiran Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān yang lebih luas mengenai berbagai tingkatan rasionalitas. Ia tidak memandang akal sebagai entitas tunggal yang bekerja dengan cara yang sama dalam setiap keadaan. Sebaliknya, rasionalitas mencakup tingkatan dan kualitas yang berbeda, bergantung pada hubungan antara pengetahuan, tindakan, dan pembinaan diri manusia. Tingkatan pertama adalah *al-ʻaql al-mujarrad*, yang dapat dipahami sebagai rasionalitas abstrak yang bekerja melalui kemampuan konseptual, penalaran, klasifikasi, dan penyusunan argumentasi. Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan pondasi penting bagi aktivitas ilmiah dan intelektual. Namun, rasionalitas abstrak memiliki keterbatasan ketika pengetahuan yang dihasilkannya terlepas dari tindakan dan orientasi moral.

Tingkatan kedua adalah *al-ʻaql al-musaddad*. Pada tingkatan ini, rasionalitas diarahkan pada tindakan melalui prinsip dan norma. Hallaq menjelaskan bahwa *guided reason* (akal yang terbimbing) berkaitan dengan tindakan yang diatur oleh prinsip-prinsip hukum dan orientasi moral, sehingga memungkinkan individu mengidentifikasi kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Meskipun demikian, Ṭāhā tidak berhenti pada bentuk rasionalitas yang sekadar

menerapkan aturan. Penerapan aturan secara formal tidak selalu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai makna dan tujuan suatu tindakan. Pada titik inilah *al-'aql al-mu'ayyad* menempati posisi khas dalam kerangka filosofis pemikirannya.

Al-'aql al-mu'ayyad merepresentasikan bentuk rasionalitas yang mengintegrasikan pengetahuan, pengalaman, praktik, dan pembinaan diri. Viersen menjelaskan bahwa *supported reason* (akal yang memperoleh dukungan) berupaya memahami realitas tidak hanya melalui manifestasi eksternalnya, tetapi juga melalui pengalaman praktis dan spiritual. Karakteristik ini menunjukkan bahwa perkembangan rasionalitas dalam pemikiran Ṭāhā bukan sekadar peningkatan kapasitas intelektual, melainkan juga merupakan proses transformasi subjek. Individu tidak seharusnya tetap tidak berubah setelah memperoleh pengetahuan. Sebaliknya, pengetahuan semestinya mentransformasi cara mereka memandang sesuatu, membentuk sikap, dan bertindak. Dengan demikian, *al-'aql al-mu'ayyad* membangun tiga hubungan utama: pertama, hubungan antara pengetahuan dan pengalaman; kedua, hubungan antara pengetahuan dan tindakan; dan ketiga, hubungan antara tindakan dan pembinaan diri.

Ketiga hubungan tersebut menjadi sangat penting ketika konsep ini diterapkan pada persoalan interpretasi. Seorang penafsir tidak sekadar menghasilkan proposisi mengenai makna suatu teks, tetapi juga membangun hubungan tertentu antara teks dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kualitas rasionalitas penafsir mempengaruhi kualitas interpretasi sekaligus cara interpretasi tersebut diterapkan. Dari perspektif ini, *al-'aql al-mu'ayyad* menyediakan landasan konseptual untuk memahami penafsir bukan semata-mata sebagai agen intelektual yang menghasilkan makna, melainkan juga sebagai subjek moral yang pengetahuan, pengalaman, tindakan, dan transformasi dirinya merupakan bagian integral dari tanggung jawab etis dalam interpretasi Al-Qur'an.

2. Al-'Aql al-Mu'ayyad sebagai Rasionalitas yang Berbasis Praktik

Salah satu karakteristik utama *al-'aql al-mu'ayyad* adalah keterkaitan antara pengetahuan dan praktik. Dalam perspektif Ṭāhā, manusia tidak mencapai bentuk rasionalitas yang lebih tinggi hanya dengan menguasai pengetahuan teoretis. Pengalaman dalam bertindak memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan manusia untuk memahami realitas. Hal inilah yang membedakan *al-'aql al-mu'ayyad* dari bentuk-bentuk rasionalitas yang sepenuhnya bersifat abstrak. Pengetahuan yang diperoleh tanpa keterlibatan dalam pengalaman hidup dapat menciptakan kesenjangan antara teori dan praktik. Bagi Ṭāhā, kesenjangan tersebut merupakan persoalan penting karena pengetahuan keagamaan pada akhirnya diarahkan pada pembentukan kehidupan manusia.

Rakhmat menunjukkan bahwa *supported reason* (akal yang memperoleh dukungan) dalam pemikiran Ṭāhā menghubungkan teori, praksis, dan pengalaman hidup. Hubungan ini menunjukkan bahwa praksis bukan sekadar penerapan teori yang telah terbentuk sebelumnya, melainkan juga merupakan bagian integral dari proses pengembangan pengetahuan. Dalam konteks interpretasi Al-Qur'an, gagasan ini memiliki implikasi penting. Penafsir tidak hanya membaca teks untuk menghasilkan proposisi teoretis, tetapi juga harus menyadari bahwa makna yang dirumuskannya berkaitan dengan tindakan manusia. Sebagai contoh, interpretasi terhadap ayat-ayat tentang keadilan tidak seharusnya terbatas pada pendefinisian konsep keadilan. Interpretasi tersebut dapat mempengaruhi cara individu memahami hubungan sosial dan menentukan sikap mereka terhadap ketidakadilan.

Demikian pula, interpretasi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dapat mempengaruhi hubungan perkawinan, interaksi antara orang tua dan anak, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban. Oleh karena itu, penafsir perlu memiliki kemampuan untuk menghubungkan teks dengan konteksnya tanpa mengorbankan ketepatan epistemologis. Pada titik ini, *al-'aql al-mu'ayyad* tidak menawarkan prosedur baru dalam penafsiran Al-Qur'an. Sebaliknya, konsep tersebut memberikan orientasi mengenai kualitas subjek yang menggunakan prosedur penafsiran. Penafsir harus memiliki kemampuan untuk

menghubungkan prinsip-prinsip dengan keadaan konkret. Karakteristik ini juga mencegah interpretasi berkembang menjadi aktivitas mekanis. Kaidah-kaidah umum tidak selalu dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan keadaan khusus. Sebaliknya, perhatian terhadap konteks tidak boleh berkembang menjadi kebebasan interpretasi tanpa batas. Penafsir harus tetap berpijak pada bukti tekstual dan argumentasi yang dapat dibenarkan serta dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, rasionalitas berbasis praktik menuntut keseimbangan antara prinsip dan konteks. Prinsip memberikan orientasi normatif, sedangkan konteks menyediakan informasi mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami dan diterapkan dalam keadaan tertentu. Keseimbangan ini sangat penting untuk membangun pendekatan interpretasi Al-Qur'an yang bertanggung jawab secara etis, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan pemahaman teoritis dengan kesadaran praktis serta kepekaan terhadap konsekuensi dari keputusan interpretatif.

3. Dimensi Epistemik Al-'Aql al-Mu'ayyad

Dimensi epistemik merupakan landasan pertama dalam rekonstruksi etika interpretasi. Interpretasi yang bertanggung jawab tidak dapat dibangun tanpa proses pemerolehan dan pengkajian pengetahuan secara memadai dan kritis. Dalam perspektif *al-'aql al-mu'ayyad*, pengetahuan tidak berhenti pada kemampuan memahami sesuatu secara abstrak. Sebaliknya, pengetahuan harus dihubungkan dengan pengalaman dan kemampuan memahami keadaan konkret. Viersen menunjukkan bahwa pengalaman praktis memungkinkan manusia menangkap dimensi internal realitas yang tidak selalu tampak pada permukaannya. Ketika prinsip ini direkonstruksi dalam kajian Al-Qur'an, penafsir dituntut untuk melampaui pemahaman terhadap struktur kebahasaan dan konteks historis. Penafsir juga perlu memahami hubungan antara teks, tujuan, nilai-nilai, dan konteks kehidupan manusia. Hal ini tidak berarti bahwa pengalaman pribadi menjadi sumber makna alternatif yang menggantikan teks. Sebaliknya, pengalaman merupakan bagian dari proses memahami relevansi suatu makna.

Tanggung jawab epistemik dapat dirumuskan melalui empat elemen utama. Pertama, kompetensi. Penafsir harus memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang-bidang relevan yang diperlukan untuk memahami teks. Kompetensi tersebut mencakup penguasaan bahasa, pengetahuan tentang Al-Qur'an, pemahaman terhadap konteks turunnya wahyu, pengenalan terhadap tradisi keilmuan, serta penguasaan metode interpretasi yang digunakan. Kedua, keterlacakan argumentasi. Setiap kesimpulan harus dapat ditelusuri kembali kepada sumber dan proses penalaran yang mendasarinya. Penafsir perlu membedakan antara hal-hal yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks dan hal-hal yang merupakan hasil interpretasi. Ketiga, transparansi asumsi. Penafsir membawa cakrawala pemikiran dan perspektif tertentu ketika berhadapan dengan teks. Oleh karena itu, interpretasi yang bertanggung jawab menuntut kesadaran terhadap asumsi-asumsi yang digunakan, termasuk asumsi sosial, budaya, dan filosofis.

Elemen keempat adalah kerendahan hati epistemik. Penafsir harus mengakui keterbatasan pengetahuan manusia. Kerendahan hati epistemik tidak berarti bahwa seluruh interpretasi harus dipandang memiliki validitas yang sama. Suatu interpretasi tetap dapat dinilai lebih kuat daripada interpretasi lainnya berdasarkan kualitas bukti dan argumentasinya. Namun, kekuatan suatu argumentasi tidak boleh diubah menjadi klaim bahwa interpretasi manusia secara mutlak identik dengan makna ilahi. Pembedaan ini penting untuk mempertahankan tanggung jawab intelektual sekaligus mengakui keterbatasan yang melekat pada aktivitas interpretasi manusia.

Dengan demikian, *al-'aql al-mu'ayyad* menyediakan landasan bagi bentuk rasionalitas yang menghindari dua ekstrem, yaitu dogmatisme dan relativisme. Dogmatisme muncul ketika suatu interpretasi manusia dipandang sebagai satu-satunya makna yang tidak dapat dipertanyakan atau diperdebatkan. Sebaliknya, relativisme muncul ketika seluruh interpretasi

dianggap sama-sama valid tanpa kriteria evaluasi yang jelas. Oleh karena itu, dimensi epistemik dalam etika interpretasi menuntut posisi yang seimbang, yakni interpretasi harus tetap terbuka terhadap pengujian kritis sekaligus dinilai berdasarkan bukti tekstual, ketelitian metodologis, dan argumentasi yang rasional. Dengan cara ini, tanggung jawab epistemik menjadi prasyarat fundamental untuk menjamin akuntabilitas intelektual dalam interpretasi Al-Qur'an.

4. Dimensi Etis Al-'Aql al-Mu'ayyad

Dimensi etis muncul dari hubungan antara pengetahuan dan tindakan. Dalam pemikiran Ṭāhā, rasionalitas memperoleh maknanya melalui kemampuan manusia mengarahkan pengetahuan kepada tindakan yang berorientasi pada nilai. Rakhmat menunjukkan bahwa *supported reason* (akal yang memperoleh dukungan) mengintegrasikan teori, praksis, dan pengalaman hidup dalam suatu kerangka etis. Oleh karena itu, etika tidak ditempatkan sebagai unsur tambahan yang baru dihadirkan setelah aktivitas intelektual selesai. Sebaliknya, pertimbangan etis telah berperan sepanjang proses interpretasi, mulai dari pemilihan sumber, penyusunan argumentasi, penentuan posisi interpretatif, hingga penerapan hasil interpretasi.

Dalam konteks interpretasi Al-Qur'an, penafsir memiliki tanggung jawab terhadap berbagai kemungkinan konsekuensi dari makna yang dihasilkannya. Interpretasi bukanlah aktivitas yang netral secara sosial. Interpretasi dapat memberikan legitimasi, membentuk kerangka normatif, serta mempengaruhi cara individu memperlakukan orang lain. Namun, tanggung jawab etis tidak berarti bahwa penafsir diperbolehkan mengubah makna teks hanya karena suatu interpretasi dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkannya. Sebaliknya, prinsip-prinsip etis berfungsi sebagai bentuk kontrol reflektif terhadap proses interpretasi. Prinsip tersebut mengharuskan penafsir menguji apakah penalaran dan kesimpulan yang dihasilkan tetap berlandaskan pada teks dan metode yang digunakan.

Sebagai contoh, ketika suatu interpretasi menghasilkan konsekuensi yang merendahkan martabat manusia, penafsir perlu mengkaji kembali landasan argumentasinya. Pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah hasil interpretasi tersebut sesuai atau bertentangan dengan preferensi moral penafsir, melainkan apakah kesimpulan tersebut benar-benar didukung oleh bukti tekstual dan kerangka metodologis yang digunakan. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik antara epistemologi dan etika. Epistemologi memastikan bahwa pertimbangan etis tidak terjerumus ke dalam subjektivisme, sedangkan etika memastikan bahwa epistemologi tidak berubah menjadi instrumen manipulasi pengetahuan. Kedua dimensi tersebut saling membutuhkan dalam membangun praktik interpretasi yang bertanggung jawab.

Dalam perspektif amanah (*trusteeship*), hubungan tersebut menjadi semakin penting karena pengetahuan dipahami dalam kerangka kepercayaan dan tanggung jawab moral. Hashas menjelaskan bahwa paradigma *al-i'timāniyyah* dalam pemikiran Ṭāhā membangun hubungan yang saling terkait antara wahyu, akal, etika, dan tindakan. Oleh karena itu, pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban moral. Dengan demikian, penafsir tidak hanya bertanggung jawab atas validitas intelektual suatu interpretasi, tetapi juga atas implikasi etis dari bagaimana interpretasi tersebut dipahami, dikomunikasikan, dan diterapkan dalam kehidupan manusia.

5. Dimensi Spiritual-Praksis *Al-'Aql al-Mu'ayyad

Dimensi spiritual merupakan karakteristik khas yang membedakan rekonstruksi ini dari pendekatan etika interpretasi yang hanya berfokus pada norma sosial atau prosedur metodologis. Namun, spiritualitas dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai pengalaman subjektif yang dapat menggantikan bukti tekstual. Pengalaman spiritual seorang penafsir tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan makna Al-Qur'an. Pendekatan semacam itu justru akan melemahkan akuntabilitas epistemik interpretasi. Sebaliknya, spiritualitas

dipahami sebagai orientasi dalam pembentukan subjek penafsir. Penafsir menyadari bahwa aktivitas memahami wahyu merupakan kegiatan yang mengandung dimensi amanah moral. Kesadaran ini dapat menumbuhkan sikap rendah hati, kejujuran intelektual, pengendalian kepentingan pribadi, serta kesediaan untuk menerima kritik dan koreksi.

Harvey menunjukkan bahwa dalam pemikiran Ṭāhā, nilai-nilai Al-Qur'an memiliki keterkaitan erat dengan pembentukan manusia dan tidak terbatas pada peraturan hukum. Nilai-nilai tersebut berfungsi membimbing manusia dalam kehidupannya sekaligus meningkatkan kualitas kemanusiaannya. Dengan demikian, spiritualitas tidak ditempatkan di luar aktivitas intelektual. Sebaliknya, spiritualitas berfungsi sebagai orientasi internal yang mempengaruhi cara penafsir menggunakan kemampuan rasionalnya. Dalam kerangka ini, penafsir tidak hanya berfokus pada pertanyaan, "Apa makna ayat ini?" tetapi juga perlu mengajukan pertanyaan, "Bagaimana saya mempertanggungjawabkan interpretasi ini?" dan "Bagaimana makna yang dihasilkan melalui interpretasi ini harus ditempatkan dalam hubungannya dengan nilai-nilai yang membimbing kehidupan manusia?"

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengubah interpretasi menjadi aktivitas reflektif. Penafsir tidak hanya berupaya mencapai kepastian mengenai makna tekstual, tetapi juga menyadari konsekuensi moral dari klaim yang dikemukakannya. Oleh karena itu, interpretasi menuntut kesadaran terhadap hubungan antara otoritas intelektual dan tanggung jawab moral. Tugas penafsir tidak hanya mencakup penetapan tingkat kelayakan suatu makna, tetapi juga mempertimbangkan implikasi etis dari penyampaian dan penerapan makna tersebut dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian, spiritualitas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian ego interpretatif. Penafsir tidak menempatkan dirinya sebagai pemilik mutlak makna, melainkan sebagai manusia yang diberi amanah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan pengetahuan. Pemahaman ini mendorong terbentuknya sikap kerendahan hati intelektual dan akuntabilitas moral, di mana otoritas interpretatif dijalankan dengan kesadaran akan keterbatasan manusia serta tanggung jawab yang melekat pada aktivitas memahami dan berinteraksi dengan wahyu ilahi.

6. Etika Interpretasi dalam Dialog dengan Fazlur Rahman

Kerangka *al-'aql al-mu'ayyad* perlu ditempatkan dalam dialog dengan teori-teori interpretasi kontemporer agar tidak berkembang menjadi konsep yang berdiri sendiri dan terputus dari diskursus yang lebih luas dalam studi Al-Qur'an. Fazlur Rahman merupakan salah satu tokoh pembanding utama. Melalui teori *double movement* (gerakan ganda), Rahman berupaya menjembatani konteks historis pewahyuan dengan kebutuhan kontemporer. Gerakan pertama membawa penafsir dari situasi masa kini kembali kepada konteks pewahyuan untuk memahami prinsip-prinsip moral yang bersifat umum. Gerakan kedua kemudian membawa prinsip-prinsip tersebut kembali untuk dihubungkan dengan berbagai persoalan dan keadaan kontemporer.

Kesamaan antara pendekatan Rahman dan rekonstruksi yang diajukan dalam penelitian ini terletak pada penekanan terhadap nilai-nilai moral. Keduanya menolak pendekatan yang hanya mengulang formulasi literal tanpa mempertimbangkan tujuan dan konteks yang mendasarinya. Meskipun demikian, perbedaan keduanya terletak pada fokus masing-masing. Rahman terutama menekankan gerakan metodologis dalam proses interpretasi, sedangkan *al-'aql al-mu'ayyad*, sebagaimana direkonstruksi dalam penelitian ini, digunakan sebagai kerangka untuk mengevaluasi kualitas subjek yang menjalankan gerakan interpretatif tersebut.

Perbedaan ini bukan alasan untuk mempertentangkan kedua pendekatan. Sebaliknya, keduanya dapat ditempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi. Metode *double movement* dapat membantu penafsir menghubungkan konteks historis dan kontemporer, sementara etika *al-'aql al-mu'ayyad* menegaskan bahwa proses tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab epistemik, moral, dan spiritual. Dengan demikian, ketelitian

metodologis disertai dengan kesadaran terhadap kewajiban etis yang melekat pada penggunaan otoritas interpretatif.

Oleh karena itu, artikel ini tidak mengajukan *al-'aql al-mu'ayyad* sebagai pengganti teori *double movement*. Sebaliknya, kontribusi penelitian ini terletak pada penambahan dimensi etika subjek interpretasi ke dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Perspektif ini melengkapi pendekatan metodologis dengan menegaskan bahwa interpretasi yang bertanggung jawab tidak hanya bergantung pada prosedur yang digunakan untuk memahami teks, tetapi juga pada integritas epistemik, orientasi moral, dan kesadaran spiritual penafsir yang menerapkannya.

7. Etika Interpretasi dalam Dialog dengan Nasr Ḥāmid Abū Zayd

Abū Zayd memberikan perhatian besar terhadap historisitas teks, bahasa, dan kebudayaan. Dalam kerangka pemikirannya, teks tidak dapat dibaca secara terpisah dari proses komunikasi dan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kesadaran hermeneutis, karena menegaskan bahwa pemahaman terhadap teks selalu berkaitan dengan kondisi historis dan sosial tertentu.

Kesadaran tersebut mengharuskan penafsir memahami bahwa dirinya hidup dalam konteks tertentu dan membawa horizon pemikiran tersendiri ketika membaca teks. Namun, kesadaran terhadap historisitas belum secara otomatis menghasilkan tanggung jawab etis. Meskipun menyadari bahwa pemahamannya dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, penafsir tetap memiliki kemungkinan menggunakan interpretasi untuk memenuhi kepentingan tertentu.

Pada titik inilah *al-'aql al-mu'ayyad* memberikan perspektif tambahan. Kesadaran kontekstual perlu disertai pertanggungjawaban kritis mengenai bagaimana konteks tersebut memengaruhi proses interpretasi. Penafsir memang tidak mungkin menghilangkan seluruh horizon subjektifnya. Oleh karena itu, langkah yang lebih realistis adalah membangun kesadaran kritis terhadap horizon tersebut, termasuk kemampuan membedakan makna yang didukung oleh argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari preferensi pribadi yang dibawa ke dalam proses pembacaan teks.

Dengan demikian, *al-'aql al-mu'ayyad* dapat dipahami sebagai landasan untuk mengembangkan refleksivitas dalam interpretasi. Penafsir tidak hanya dituntut untuk membaca dan memahami teks, tetapi juga perlu melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri sebagai bagian dari proses interpretasi. Refleksivitas ini memungkinkan penafsir mengenali keterbatasan perspektif, menguji asumsi yang digunakan, serta mempertanggungjawabkan pengaruh subjektivitasnya terhadap makna yang dihasilkan. Dengan demikian, kesadaran hermeneutis tidak berhenti pada pengakuan terhadap historisitas teks dan penafsir, tetapi berkembang menjadi tanggung jawab epistemik dan etis dalam memahami Al-Qur'an.

8. Etika Interpretasi dalam Dialog dengan Abdullah Saeed

Pendekatan Abdullah Saeed memberikan perhatian besar terhadap interpretasi kontekstual, khususnya dalam memahami ayat-ayat etika-hukum. Saeed berupaya mempertemukan konteks sosiohistoris pewahyuan dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat modern. Melalui pendekatan ini, pemahaman terhadap teks tidak hanya diarahkan pada makna historisnya, tetapi juga pada relevansi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan kontemporer.

Pendekatan tersebut memiliki kedekatan dengan rekonstruksi yang dikembangkan dalam penelitian ini, terutama dalam hal perhatian terhadap konteks dan nilai. Namun, terdapat perbedaan fokus di antara keduanya. Saeed terutama mengembangkan perangkat metodologis untuk membantu penafsir memahami dan mengontekstualisasikan pesan Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan dimensi akuntabilitas subjek yang melakukan interpretasi.

Perbedaan fokus tersebut memungkinkan terbentuknya hubungan yang saling melengkapi. Penafsir dapat menggunakan pendekatan kontekstual untuk memahami hubungan antara teks dan konteks sosialnya, sekaligus menerapkan kerangka akuntabilitas untuk mengevaluasi bagaimana dirinya menggunakan metode tersebut. Dengan demikian, perhatian tidak hanya diarahkan pada ketepatan prosedur interpretasi, tetapi juga pada tanggung jawab epistemik, etis, dan spiritual penafsir dalam menghasilkan serta menerapkan makna.

Dalam kerangka tersebut, *al-'aql al-mu'ayyad* berfungsi sebagai kerangka meta-metodologis. Konsep ini tidak menetapkan langkah-langkah teknis penafsiran Al-Qur'an, melainkan memberikan orientasi normatif mengenai kualitas penafsir yang menggunakan suatu metode. Orientasi tersebut menegaskan bahwa kompetensi metodologis perlu disertai kesadaran reflektif, integritas intelektual, tanggung jawab moral, dan komitmen untuk menghubungkan pemahaman teks dengan kehidupan manusia secara bertanggung jawab.

9. Dari Validitas Interpretasi menuju Akuntabilitas Interpretatif

Pembahasan di atas mengarah pada pembedaan mendasar antara validitas dan akuntabilitas interpretasi. Validitas berkaitan dengan kekuatan metodologis dan argumentatif suatu interpretasi. Suatu interpretasi dinilai berdasarkan sumber yang digunakan, ketepatan metode, konsistensi penalaran, serta kemampuannya menjelaskan hubungan antara data dan kesimpulan. Dengan demikian, validitas terutama berkenaan dengan sejauh mana suatu interpretasi dapat dipertahankan secara ilmiah melalui landasan dan argumentasi yang memadai.

Sementara itu, akuntabilitas memiliki cakupan yang lebih luas. Akuntabilitas tidak hanya mempertanyakan apakah suatu interpretasi memiliki dasar yang memadai, tetapi juga bagaimana penafsir menggunakan pengetahuannya dan apa konsekuensi dari penggunaan pengetahuan tersebut. Pembedaan ini penting karena suatu interpretasi mungkin memiliki struktur argumentasi yang kuat, tetapi digunakan untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, interpretasi yang berorientasi pada nilai-nilai moral yang baik tetap dapat menimbulkan persoalan apabila tidak didukung oleh landasan epistemik yang memadai.

Atas dasar itu, penelitian ini mengusulkan konsep *akuntabilitas interpretatif* sebagai titik temu antara dimensi epistemologi, etika, dan spiritualitas. Akuntabilitas interpretatif merujuk pada kondisi ketika penafsir dapat dimintai pertanggungjawaban setidaknya dalam tiga aspek. Pertama, bagaimana pengetahuan interpretatif diperoleh, dikembangkan, dan diuji. Kedua, nilai serta orientasi moral apa yang bekerja dalam proses interpretasi dan bagaimana konsekuensi dari penerapannya dipertimbangkan. Ketiga, bagaimana penafsir menempatkan aktivitas interpretasi sebagai bagian dari proses pembentukan diri dan pengamalan nilai-nilai yang dipahami melalui teks.

Penting untuk ditegaskan bahwa konsep *akuntabilitas interpretatif* merupakan konstruksi konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini berdasarkan rekonstruksi pemikiran Ṭāhā 'Abd al-Raḥmān, khususnya gagasan *al-'aql al-mu'ayyad*. Konsep tersebut bukan istilah yang secara eksplisit dirumuskan oleh Ṭāhā sebagai teori penafsiran Al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bermaksud mengatribusikan teori tafsir baru kepada Ṭāhā, melainkan mengembangkan implikasi pemikirannya menjadi kerangka normatif untuk memahami tanggung jawab penafsir. Penegasan posisi ini diperlukan agar kontribusi konseptual penelitian tetap proporsional dan tidak melampaui klaim teoretis yang dapat didukung oleh sumber pemikiran aslinya.

10. Rekonstruksi Tanggung Jawab Epistemik

Tanggung jawab epistemik merupakan lapisan pertama dalam model yang ditawarkan oleh penelitian ini. Pada lapisan ini, penafsir dituntut untuk mampu menjelaskan sumber pengetahuan yang digunakan, metode yang diterapkan, hubungan antara bukti dan kesimpulan, serta batas-batas interpretasi yang dihasilkannya. Dengan demikian, tanggung

jawab epistemik tidak hanya berkaitan dengan penguasaan pengetahuan, tetapi juga dengan keterbukaan penafsir dalam menjelaskan proses pembentukan dan dasar pembenaran interpretasinya.

Dalam praktiknya, tanggung jawab epistemik dapat diwujudkan melalui beberapa prinsip. Pertama, penafsir harus membedakan antara teks dan interpretasi. Al-Qur'an sebagai wahyu tidak identik dengan penafsiran manusia terhadapnya. Pembedaan ini penting agar hasil pemahaman manusia tidak diposisikan sebagai kebenaran ilahi yang mutlak. Kedua, penafsir harus membedakan antara data dan asumsi. Asumsi filosofis, sosial, maupun politik yang memengaruhi proses interpretasi tidak boleh disamarkan seolah-olah merupakan makna yang secara langsung dinyatakan oleh teks.

Ketiga, penafsir perlu menjelaskan alasan yang mendasari pemilihan suatu interpretasi. Penjelasan tersebut memungkinkan pihak lain menelusuri dasar argumentasi, menguji konsistensi penalaran, serta mengevaluasi kesimpulan yang dihasilkan. Dengan demikian, interpretasi tidak hanya menjadi produk pemikiran individual, tetapi juga terbuka terhadap evaluasi akademik dan dialog ilmiah. Keempat, penafsir perlu mengakui keterbatasan pengetahuan dan penalarannya. Tidak semua persoalan harus menghasilkan satu kesimpulan interpretatif yang bersifat mutlak, terutama ketika terdapat perbedaan bukti, pendekatan metodologis, atau konteks yang relevan.

Kerangka tanggung jawab epistemik ini dapat berkontribusi terhadap pembentukan budaya akademik yang lebih sehat dalam studi Al-Qur'an. Perbedaan penafsiran tidak selalu menunjukkan bahwa salah satu pihak tidak memiliki dasar ilmiah. Perbedaan tersebut dapat muncul akibat variasi metode, sumber rujukan, asumsi, maupun konteks yang digunakan oleh masing-masing penafsir. Hal yang paling mendasar adalah sejauh mana perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui argumentasi yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tanggung jawab epistemik menjadi fondasi bagi dialog ilmiah yang kritis sekaligus menghargai keragaman interpretasi.

11. Rekonstruksi Tanggung Jawab Etis

Tanggung jawab etis merupakan lapisan kedua dalam kerangka akuntabilitas interpretatif. Dimensi ini berkaitan dengan orientasi moral penafsir serta konsekuensi sosial yang ditimbulkan oleh suatu interpretasi. Dengan demikian, kegiatan penafsiran tidak hanya dinilai berdasarkan ketepatan pemahaman dan kekuatan argumentasinya, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai moral yang mendasari serta implikasi yang muncul dari penerapannya.

Dalam kerangka ini, penafsir perlu mengajukan sejumlah pertanyaan reflektif: apakah interpretasi yang dihasilkan telah mempertimbangkan prinsip keadilan, martabat manusia, kemaslahatan, dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam wahyu? Pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dari evaluasi etis terhadap hasil penafsiran, terutama karena pemahaman terhadap teks keagamaan dapat mempengaruhi cara individu maupun masyarakat memperlakukan sesamanya.

Pertimbangan etis tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan analisis tekstual ataupun menjadikan preferensi moral penafsir sebagai dasar penentuan makna ayat. Sebaliknya, dimensi etis berfungsi sebagai instrumen reflektif untuk menguji konsekuensi dari suatu kesimpulan interpretatif. Dengan demikian, pertimbangan moral tetap harus berjalan dalam batas-batas argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara tekstual dan metodologis.

Sebagai contoh, apabila suatu interpretasi menghasilkan pembenaran terhadap perlakuan diskriminatif, penafsir perlu meninjau kembali struktur argumentasi yang mendasarinya. Peninjauan tersebut mencakup pertanyaan apakah diskriminasi benar-benar merupakan konsekuensi yang didukung oleh teks dan metode penafsiran, atau justru muncul akibat asumsi, kepentingan, dan prasangka yang dibawa oleh penafsir. Melalui proses ini, etika

berfungsi sebagai mekanisme koreksi diri (*self-correction*) yang memungkinkan penafsir mengevaluasi kembali argumentasinya secara kritis.

Dalam konteks tersebut, kebebasan interpretatif dan tanggung jawab moral tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua prinsip yang saling bertentangan. Kebebasan intelektual merupakan prasyarat bagi perkembangan studi Al-Qur'an karena memungkinkan munculnya pertanyaan, pendekatan, dan argumentasi baru. Namun, kebebasan tersebut tidak berarti bahwa penafsir terbebas dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dasar pengetahuan, orientasi moral, serta konsekuensi sosial dari interpretasinya. Dengan demikian, kebebasan interpretatif perlu berjalan beriringan dengan kesadaran etis agar pengembangan pemahaman terhadap Al-Qur'an tetap terbuka sekaligus bertanggung jawab.

12. Rekonstruksi Tanggung Jawab Spiritual-Praksis

Tanggung jawab spiritual-praksis merupakan lapisan ketiga dalam kerangka akuntabilitas interpretatif. Dimensi ini menegaskan bahwa penafsir tidak hanya berperan sebagai produsen pengetahuan tentang wahyu, tetapi juga sebagai subjek yang menjalani kehidupan dalam relasi dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, aktivitas interpretasi idealnya memiliki keterkaitan dengan proses pembentukan dan transformasi diri penafsir.

Dalam kerangka *al-'aql al-mu'ayyad*, pengetahuan dan praktik merupakan dua unsur yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Kematangan rasionalitas tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan memahami, mengolah, dan mengkonstruksi pengetahuan, tetapi juga oleh kapasitas untuk mengaktualisasikan pengetahuan tersebut ke dalam tindakan. Dengan demikian, kualitas rasionalitas turut tercermin dalam hubungan antara pemahaman, pengalaman, dan praktik kehidupan.

Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, prinsip tersebut dapat diterjemahkan sebagai tuntutan agar penafsir tidak memperlakukan Al-Qur'an semata-mata sebagai objek kajian akademik. Aktivitas akademik tetap memiliki kedudukan penting dan harus dilaksanakan berdasarkan kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, relasi dengan wahyu juga mengandung dimensi pembentukan moral yang mendorong penafsir untuk merefleksikan kesesuaian antara pemahaman yang dihasilkan dan nilai-nilai yang dijalani dalam kehidupannya.

Spiritualitas dalam pengertian ini tidak identik dengan sentimentalitas ataupun pengalaman subjektif semata. Spiritualitas merupakan kesadaran bahwa pengetahuan mengandung tanggung jawab yang melampaui pencapaian intelektual. Kesadaran tersebut menuntut penafsir untuk mengendalikan ego intelektual, menghindari manipulasi terhadap pengetahuan dan argumentasi, serta senantiasa membuka diri terhadap kritik dan koreksi. Dengan demikian, spiritualitas menjadi orientasi internal yang mempengaruhi cara penafsir memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan pengetahuan.

13. Model Integratif Etika Interpretasi

Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, penelitian ini mengusulkan suatu model akuntabilitas interpretatif yang berlandaskan pada konsep *al-'aql al-mu'ayyad*. Dalam model ini, *al-'aql al-mu'ayyad* menjadi landasan konseptual yang mendasari pembentukan tiga dimensi tanggung jawab penafsir, yaitu tanggung jawab epistemik, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab spiritual-praksis. Integrasi ketiga dimensi tersebut kemudian membentuk akuntabilitas interpretatif yang menjadi landasan bagi terwujudnya interpretasi Al-Qur'an yang bertanggung jawab.

Model tersebut tidak dimaksudkan sebagai proses linear yang mengharuskan satu dimensi diselesaikan terlebih dahulu sebelum dimensi berikutnya dapat dijalankan. Sebaliknya, ketiga dimensi tanggung jawab tersebut bekerja secara interdependen dan saling memperkuat. Tanggung jawab epistemik memastikan bahwa interpretasi dibangun di atas dasar pengetahuan

dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab etis memastikan bahwa pengetahuan tidak digunakan secara manipulatif serta tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral dan konsekuensi kemanusiaan. Sementara itu, tanggung jawab spiritual-praksis menegaskan kesadaran penafsir terhadap dimensi amanah dan pembentukan diri dalam aktivitas interpretasi.

Integrasi ketiga dimensi tersebut membentuk akuntabilitas interpretatif sebagai kerangka pertanggungjawaban yang mencakup aspek intelektual, moral, dan spiritual-praktis. Dengan demikian, akuntabilitas interpretatif tidak hanya menilai apakah suatu interpretasi memiliki dasar ilmiah yang memadai, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana pengetahuan digunakan, nilai-nilai apa yang mendasarinya, serta sejauh mana penafsir menyadari tanggung jawabnya dalam mengaktualisasikan pemahaman terhadap wahyu.

Secara operasional, model ini dapat dijelaskan melalui tiga pertanyaan reflektif. Dari dimensi epistemik, penafsir perlu mempertanyakan apakah interpretasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik dari segi sumber, metode, maupun argumentasinya. Dari dimensi etis, penafsir perlu mengevaluasi apakah interpretasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara moral dengan mempertimbangkan nilai keadilan, martabat manusia, dan konsekuensi sosialnya. Adapun dari dimensi spiritual-praksis, penafsir perlu merefleksikan apakah aktivitas interpretasi dijalankan dengan kesadaran bahwa pengetahuan merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab serta aktualisasi nilai dalam kehidupan.

Ketiga pertanyaan tersebut memperluas standar evaluasi interpretasi Al-Qur'an. Penilaian terhadap suatu interpretasi tidak lagi terbatas pada validitas tekstual dan metodologis, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral serta kesadaran spiritual-praktis penafsir. Melalui kerangka ini, *al-'aql al-mu'ayyad* direkonstruksi sebagai landasan normatif bagi pengembangan interpretasi Al-Qur'an yang tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai moral dan kesadaran amanah.

14. Novelty Penelitian

Kebaruan penelitian ini perlu dirumuskan secara hati-hati dengan mempertimbangkan perkembangan kajian mengenai pemikiran Ṭāhā 'Abd al-Raḥmān dan *trusteeship paradigm* yang telah berlangsung cukup luas. Penelitian ini tidak mengklaim sebagai kajian pertama yang membahas konsep *al-'aql al-mu'ayyad*. Konsep tersebut telah menjadi bagian dari diskusi akademik mengenai rasionalitas, etika, sufisme, modernitas, dan *trusteeship paradigm*. Demikian pula, hubungan antara pemikiran Ṭāhā dan nilai-nilai Qur'ani telah memperoleh perhatian dalam berbagai penelitian terdahulu. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini tidak terletak pada penemuan konsep baru dalam pemikiran Ṭāhā, melainkan pada rekonstruksi fungsi konseptual *al-'aql al-mu'ayyad* dalam konteks studi interpretasi Al-Qur'an.

Pertama, penelitian ini merekonstruksi *al-'aql al-mu'ayyad* dari konsep yang menjelaskan tingkatan rasionalitas menjadi kerangka konseptual untuk mengevaluasi kualitas subjek interpretasi. Melalui rekonstruksi ini, perhatian tidak hanya diarahkan pada kemampuan intelektual penafsir dalam memahami teks dan menyusun argumentasi, tetapi juga pada kualitas dirinya sebagai subjek yang bertanggung jawab atas pengetahuan yang dihasilkan. Dengan demikian, *al-'aql al-mu'ayyad* memperoleh fungsi konseptual dalam menjelaskan hubungan antara kapasitas rasionalitas dan tanggung jawab penafsir.

Kedua, penelitian ini menghubungkan konsep tersebut dengan tiga dimensi tanggung jawab, yaitu tanggung jawab epistemik, etis, dan spiritual-praksis. Ketiga dimensi ini digunakan untuk menjelaskan bahwa kualitas penafsir tidak cukup dinilai berdasarkan penguasaan terhadap sumber dan metode penafsiran. Penafsir juga dituntut memiliki orientasi moral dalam menggunakan pengetahuan serta kesadaran spiritual yang mendorong aktualisasi nilai-nilai wahyu dalam kehidupan. Integrasi ketiga dimensi tersebut memperluas pembahasan mengenai

rasionalitas dari aspek kemampuan intelektual menuju pembentukan subjek interpretasi yang bertanggung jawab.

Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan ketiga dimensi tanggung jawab tersebut ke dalam konsep *akuntabilitas interpretatif*. Konsep ini dikembangkan sebagai konstruksi analitis penelitian untuk menjelaskan pertanggungjawaban penafsir atas proses pembentukan pengetahuan, orientasi moral, dan implikasi spiritual-praktis dari interpretasinya. Dengan demikian, *akuntabilitas interpretatif* bukan merupakan istilah atau teori tafsir yang secara eksplisit dirumuskan oleh Ṭāhā, melainkan kontribusi konseptual penelitian yang dibangun melalui rekonstruksi pemikirannya, khususnya konsep *al-ʻaql al-muʼayyad*.

Keempat, penelitian ini menempatkan kerangka tersebut dalam dialog dengan metodologi interpretasi kontemporer. Dialog ini bertujuan menunjukkan bahwa *al-ʻaql al-muʼayyad* tidak perlu diposisikan sebagai metode tafsir baru yang menggantikan pendekatan yang telah berkembang. Sebaliknya, konsep tersebut direkonstruksi sebagai kerangka etika normatif-interpretatif yang dapat melengkapi metodologi penafsiran dengan memberikan perhatian khusus pada tanggung jawab dan kualitas subjek yang melakukan interpretasi.

Posisi tersebut menjadikan kontribusi penelitian ini lebih terukur dan menghindari klaim yang melampaui cakupan kajian. Artikel ini tidak menyatakan bahwa Ṭāhā telah merumuskan jawaban final mengenai persoalan etika penafsiran Al-Qur'an. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa struktur pemikirannya, terutama konsep *al-ʻaql al-muʼayyad*, memiliki potensi konseptual untuk direkonstruksi dalam menjawab persoalan tanggung jawab penafsir. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian terletak pada pengembangan kerangka *akuntabilitas interpretatif* yang mengintegrasikan dimensi epistemik, etis, dan spiritual-praksis sebagai landasan normatif bagi interpretasi Al-Qur'an yang bertanggung jawab.

15. Kontribusi Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap dua bidang kajian. Pertama, penelitian ini memperluas studi mengenai pemikiran Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān dengan menunjukkan kemungkinan pemanfaatan konsep *al-ʻaql al-muʼayyad* dalam studi interpretasi Al-Qur'an. Melalui rekonstruksi konseptual, gagasan tersebut tidak hanya dipahami dalam konteks tingkatan rasionalitas, tetapi juga dikembangkan sebagai landasan normatif untuk memahami kualitas dan tanggung jawab subjek interpretasi.

Kedua, penelitian ini memperluas diskursus etika interpretasi dengan menempatkan kualitas subjek penafsir sebagai bagian penting dari objek kajian. Selama ini, pembahasan mengenai metodologi tafsir cenderung memberikan perhatian besar pada perangkat konseptual dan prosedur yang digunakan untuk memahami teks. Kerangka yang dikembangkan dalam penelitian ini mengingatkan bahwa perangkat metodologis tersebut selalu digunakan oleh subjek manusia yang memiliki horizon pemahaman, kepentingan, pengalaman, dan orientasi nilai tertentu. Oleh karena itu, persoalan mengenai siapa yang melakukan penafsiran dan bagaimana ia menjalankan aktivitas interpretasi perlu menjadi bagian integral dari pembahasan etika pengetahuan dalam studi Al-Qur'an.

Kontribusi teoretis tersebut dapat dijelaskan melalui tiga proposisi yang saling berkaitan. Pertama, interpretasi Al-Qur'an yang bertanggung jawab mensyaratkan ketelitian dan keteguhan epistemik (*epistemic rigor*), yaitu kemampuan penafsir membangun pemahaman berdasarkan sumber, metode, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, ketelitian epistemik perlu disertai orientasi etis agar pengetahuan yang dihasilkan tidak digunakan secara manipulatif, melainkan diarahkan untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral dan konsekuensi kemanusiaan. Ketiga, orientasi etis perlu ditopang oleh kesadaran spiritual-praksis agar pengetahuan tidak berhenti sebagai pencapaian intelektual, tetapi dipahami sebagai amanah yang menuntut pembentukan diri dan aktualisasi nilai dalam kehidupan.

Ketiga proposisi tersebut membentuk suatu kerangka konseptual yang mengintegrasikan dimensi epistemik, etis, dan spiritual-praksis. Integrasi ini menegaskan bahwa tanggung jawab interpretatif tidak dapat direduksi menjadi persoalan ketepatan metodologis semata. Sebaliknya, tanggung jawab tersebut mencakup keterpaduan antara cara pengetahuan diperoleh dan dibangun, orientasi moral dalam penggunaannya, serta kesadaran penafsir terhadap amanah dan implikasi praktis dari pemahaman yang dihasilkan.

16. Implikasi terhadap Studi Tafsir Kontemporer

Kerangka akuntabilitas interpretatif yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki sejumlah implikasi bagi pengembangan studi dan praktik penafsiran Al-Qur'an. Pertama, pendidikan tafsir perlu memperluas pemahaman mengenai kompetensi seorang penafsir. Kompetensi tidak cukup dibatasi pada penguasaan bahasa Arab dan ilmu-ilmu Al-Qur'an, tetapi juga perlu mencakup kemampuan reflektif untuk mengenali asumsi yang mendasari suatu interpretasi, mengevaluasi keterbatasan argumentasi, serta mempertimbangkan konsekuensi dari pemahaman yang dihasilkan. Dengan demikian, pendidikan tafsir tidak hanya diarahkan pada pembentukan kemampuan teknis dan metodologis, tetapi juga pada pembentukan penafsir yang memiliki kesadaran epistemik dan tanggung jawab moral.

Kedua, penelitian tafsir perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap transparansi argumentasi. Peneliti dituntut untuk menjelaskan secara jelas perbedaan antara data tekstual, informasi historis, asumsi teoritis, dan interpretasi yang dikembangkan. Pembedaan tersebut penting agar pembaca dapat menelusuri proses pembentukan kesimpulan serta mengevaluasi hubungan antara bukti dan argumentasi. Transparansi semacam ini juga memungkinkan dialog akademik berlangsung secara lebih terbuka karena dasar dan batas suatu interpretasi dapat diketahui serta diuji secara kritis.

Ketiga, etika penafsir perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari metodologi penafsiran. Etika bukan sekadar pertimbangan tambahan yang muncul setelah proses interpretasi selesai, melainkan telah berperan sejak penentuan masalah penelitian, pemilihan sumber, penggunaan metode, penyusunan argumentasi, hingga perumusan kesimpulan. Oleh karena itu, setiap keputusan metodologis perlu disertai kesadaran mengenai tanggung jawab intelektual dan moral yang melekat pada aktivitas interpretasi. Penempatan etika dalam keseluruhan proses tersebut dapat membantu mencegah penggunaan pengetahuan secara manipulatif maupun penyalahgunaan otoritas interpretatif.

Keempat, dialog antar perspektif perlu dipahami sebagai mekanisme pengujian epistemik yang penting dalam pengembangan studi Al-Qur'an. Perbedaan pendekatan dan kesimpulan tidak selalu menunjukkan kelemahan ilmiah, tetapi dapat menjadi kesempatan untuk menguji asumsi, memperbaiki argumentasi, dan memperluas pemahaman. Dalam konteks ini, kerendahan hati epistemik memungkinkan penafsir menerima kritik dan mempertimbangkan perspektif lain tanpa harus kehilangan pendirian ilmiah yang didasarkan pada argumentasi dan bukti yang memadai. Dengan demikian, dialog akademik tidak hanya berfungsi sebagai pertukaran gagasan, tetapi juga sebagai sarana pengembangan tanggung jawab intelektual.

Kelima, interpretasi Al-Qur'an perlu mempertimbangkan konsekuensi sosial yang mungkin ditimbulkan oleh hasil penafsiran. Pertimbangan tersebut tidak berarti bahwa konsekuensi sosial dapat secara otomatis menentukan benar atau salahnya suatu interpretasi, sebab penilaian terhadap kebenaran tetap harus berpijak pada bukti tekstual, ketepatan metodologis, dan kekuatan argumentasi. Namun, dampak sosial merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan dari tanggung jawab moral penafsir. Oleh karena itu, penafsir perlu menyadari bahwa pemahaman yang dihasilkan dapat mempengaruhi cara individu dan masyarakat memandang persoalan, membentuk sikap, serta memperlakukan sesama manusia.

17. Relevansi terhadap Pengembangan Etika Tafsir

Etika tafsir dapat dikembangkan sebagai bidang kajian yang tidak hanya berfokus pada pertanyaan mengenai bagaimana suatu teks ditafsirkan, tetapi juga bagaimana seseorang membentuk dirinya menjadi penafsir yang bertanggung jawab. Pergeseran perhatian ini memperluas cakupan etika interpretasi dari persoalan prosedur dan ketepatan metodologis menuju kualitas subjek yang menggunakan perangkat penafsiran. Dengan demikian, etika tafsir tidak hanya mengevaluasi proses dan hasil interpretasi, tetapi juga menelaah sikap serta tanggung jawab intelektual dan moral penafsir.

Orientasi tersebut dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah prinsip normatif. Penafsir dituntut untuk bersikap jujur dalam menggunakan dan menyajikan sumber, transparan dalam menjelaskan metode, serta menyadari keterbatasan pengetahuan dan argumentasinya. Selain itu, penafsir perlu mempertimbangkan konsekuensi dari interpretasi yang dihasilkan, membuka diri terhadap kritik dan koreksi, serta menghubungkan pengetahuan dengan proses pembentukan moral. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab penafsir tidak berhenti pada kemampuan menghasilkan argumentasi yang meyakinkan, tetapi juga mencakup integritas dalam memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan pengetahuan.

Prinsip-prinsip tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan ilmu tafsir ataupun mengurangi kedudukan perangkat metodologis yang telah berkembang dalam tradisi keilmuan Al-Qur'an. Sebaliknya, prinsip tersebut berfungsi sebagai dimensi etis yang menyertai penerapan ilmu tafsir. Dengan demikian, ketepatan metodologis dan tanggung jawab etis tidak ditempatkan sebagai dua aspek yang terpisah, melainkan sebagai unsur yang saling melengkapi dalam menghasilkan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kerangka ini, etika interpretasi dapat dipahami sebagai etika penggunaan otoritas epistemik. Penafsir memiliki otoritas epistemik karena kapasitas keilmuan dan kemampuannya dalam menghasilkan, mengembangkan, serta menjelaskan pengetahuan tentang wahyu. Namun, otoritas tersebut tidak seharusnya berkembang menjadi bentuk dominasi intelektual yang menutup ruang kritik atau menempatkan interpretasi manusia sebagai kebenaran yang tidak dapat dipersoalkan. Otoritas epistemik justru menuntut keterbukaan, transparansi, dan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan setiap klaim interpretatif.

Konsep *al-'aql al-mu'ayyad* memberikan landasan konseptual untuk menjelaskan mengapa otoritas intelektual perlu disertai pembentukan diri. Dalam kerangka ini, kematangan rasionalitas tidak hanya diukur berdasarkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menghasilkan pengetahuan, tetapi juga berdasarkan kesanggupannya menggunakan pengetahuan tersebut secara bertanggung jawab. Semakin besar kemampuan seseorang dalam menghasilkan dan memengaruhi pemahaman orang lain melalui pengetahuan, semakin besar pula tanggung jawab epistemik, etis, dan spiritual-praksis yang harus menyertainya. Oleh karena itu, pembentukan penafsir yang bertanggung jawab menjadi bagian penting dari pengembangan etika interpretasi Al-Qur'an.

18. Perbedaan antara Rekonstruksi dan Atribusi kepada Ṭāhā

Salah satu persoalan metodologis yang perlu ditegaskan dalam penelitian ini adalah pembedaan antara pemikiran asli Ṭāhā 'Abd al-Raḥmān dan hasil rekonstruksi konseptual yang dikembangkan oleh peneliti. Ṭāhā mengembangkan konsep *al-'aql al-mu'ayyad* dalam struktur pemikirannya mengenai rasionalitas, praktik, etika, dan spiritualitas. Penelitian ini selanjutnya mengkaji karakteristik konseptual tersebut dan menghubungkannya dengan persoalan tanggung jawab dalam interpretasi Al-Qur'an. Dengan demikian, pembahasan mengenai etika interpretasi merupakan hasil pembacaan dan pengembangan analitis terhadap pemikiran Ṭāhā, bukan representasi langsung dari suatu teori tafsir yang secara eksplisit dirumuskannya.

Atas dasar pembedaan tersebut, istilah seperti "tanggung jawab epistemik", "tanggung jawab etis", "tanggung jawab spiritual-praksis", dan "akuntabilitas interpretatif" digunakan

sebagai kategori analitis yang dikembangkan dalam penelitian ini. Kategori-kategori tersebut berfungsi untuk mengoperasionalkan karakteristik *al-'aql al-mu'ayyad* ke dalam kerangka pembahasan etika interpretasi Al-Qur'an. Oleh karena itu, istilah-istilah tersebut tidak dapat secara langsung diatribusikan kepada Ṭāhā sebagai terminologi asli atau bagian dari rumusan teori tafsirnya.

Perbedaan antara pemikiran tokoh dan hasil rekonstruksi penelitian bukan merupakan kelemahan konseptual. Sebaliknya, pembedaan tersebut menunjukkan kesadaran metodologis peneliti dalam mengembangkan gagasan seorang pemikir tanpa mengaburkan batas antara formulasi asli dan interpretasi akademik yang dihasilkan. Penelitian tidak hanya mengulang atau mendeskripsikan pemikiran Ṭāhā, tetapi juga mengidentifikasi kemungkinan relevansi konseptualnya bagi persoalan yang belum secara khusus menjadi fokus pembahasan dalam kerangka pemikiran tersebut.

Rekonstruksi konseptual dapat dipertanggungjawabkan secara akademik sepanjang hubungan antara konsep asli dan pengembangan analitis peneliti dijelaskan secara transparan. Hal ini mencakup ketepatan dalam mengidentifikasi gagasan utama, konsistensi dalam menafsirkan karakteristik konsep, serta kejelasan dalam menunjukkan bagian yang merupakan pengembangan peneliti. Melalui cara tersebut, kebaruan penelitian dapat ditempatkan secara proporsional pada kerja analitis dan rekonstruktif yang dilakukan, yaitu pengembangan kerangka akuntabilitas interpretatif berdasarkan konsep *al-'aql al-mu'ayyad* untuk memperluas diskursus etika interpretasi Al-Qur'an.

19. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami cakupan dan kontribusinya. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan sehingga model akuntabilitas interpretatif yang dikembangkan belum diuji secara empiris dalam praktik penafsiran Al-Qur'an. Oleh karena itu, efektivitas dan penerapannya dalam mengevaluasi karya tafsir belum dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian ini.

Kedua, penelitian ini berfokus pada rekonstruksi pemikiran Ṭāhā 'Abd al-Raḥmān, khususnya konsep *al-'aql al-mu'ayyad*. Fokus tersebut menyebabkan penelitian ini belum membandingkan secara komprehensif model yang ditawarkan dengan keseluruhan teori etika interpretasi yang berkembang dalam studi Al-Qur'an. Dengan demikian, posisi konseptual model ini dalam hubungannya dengan berbagai pendekatan etika dan metodologi penafsiran masih memerlukan kajian komparatif lebih lanjut.

Ketiga, konsep akuntabilitas interpretatif yang ditawarkan masih berada pada tahap pengembangan konseptual. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menguji relevansi dan kegunaan model tersebut melalui analisis terhadap karya-karya tafsir tertentu. Pengujian dapat dilakukan dengan memilih beberapa karya tafsir kontemporer dan menggunakan tiga dimensi tanggung jawab sebagai perangkat analisis. Tanggung jawab epistemik dapat ditelaah melalui sumber pengetahuan, penggunaan metode, dan konstruksi argumentasi penafsir. Tanggung jawab etis dapat dianalisis berdasarkan orientasi nilai, pertimbangan moral, dan konsekuensi sosial dari interpretasi. Sementara itu, tanggung jawab spiritual-praksis dapat dikaji melalui hubungan antara pengetahuan, pembentukan diri, dan aktualisasi nilai-nilai wahyu dalam kehidupan.

Selain pengujian melalui analisis karya tafsir, penelitian komparatif juga diperlukan untuk memperjelas posisi dan kontribusi model akuntabilitas interpretatif dalam diskursus kontemporer. Perbandingan dapat dilakukan dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, hermeneutika kontekstual, maupun teori etika interpretasi lainnya. Kajian semacam ini dapat mengidentifikasi titik temu, perbedaan konseptual, serta kemungkinan integrasi antara kerangka akuntabilitas interpretatif dan pendekatan-pendekatan yang telah berkembang.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, artikel ini dapat diposisikan sebagai tahap awal pengembangan konseptual mengenai etika interpretasi Al-Qur'an melalui

rekonstruksi pemikiran Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān. Kontribusi utamanya terletak pada perumusan kerangka akuntabilitas interpretatif yang mengintegrasikan tanggung jawab epistemik, etis, dan spiritual-praksis. Kerangka ini selanjutnya membuka ruang bagi penelitian empiris, komparatif, dan aplikatif untuk menguji relevansi serta mengembangkan penerapannya dalam studi penafsiran Al-Qur'an.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *al-ʻaql al-mu'ayyad* dalam pemikiran Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān memiliki potensi konseptual untuk dikembangkan sebagai landasan etika interpretasi Al-Qur'an. Potensi tersebut berangkat dari karakter rasionalitas yang ditawarkan Ṭāhā, yang tidak membatasi akal pada kemampuan abstraksi dan penalaran teoretis, tetapi menghubungkannya dengan praktik, pengalaman, nilai, pembentukan diri, dan orientasi spiritual. Dengan demikian, rasionalitas tidak hanya dipahami sebagai kapasitas intelektual untuk menghasilkan pengetahuan, tetapi juga sebagai kemampuan untuk mengarahkan pengetahuan menuju tindakan dan pembentukan manusia.

Dalam struktur pemikiran Ṭāhā, *al-ʻaql al-mu'ayyad* merupakan bentuk rasionalitas yang melampaui rasionalitas abstraktif maupun rasionalitas yang semata-mata berorientasi pada penerapan aturan. Rasionalitas ini mengintegrasikan proses mengetahui dengan pengalaman dan tindakan. Oleh karena itu, pengetahuan tidak diperlakukan sebagai tujuan akhir yang terpisah dari kehidupan, melainkan sebagai bagian dari proses pembentukan diri manusia. Karakter inilah yang menjadi dasar bagi penelitian ini untuk merekonstruksi relevansi *al-ʻaql al-mu'ayyad* dalam konteks tanggung jawab penafsir Al-Qur'an.

Ketika karakteristik tersebut direkonstruksi dalam konteks etika interpretasi Al-Qur'an, penelitian ini mengidentifikasi tiga dimensi utama tanggung jawab penafsir. Pertama, tanggung jawab epistemik, yaitu kewajiban penafsir untuk membangun interpretasi berdasarkan sumber pengetahuan, argumentasi, kompetensi keilmuan, transparansi metodologis, dan kesadaran terhadap keterbatasan pengetahuan. Kedua, tanggung jawab etis, yaitu kewajiban mempertimbangkan orientasi nilai dan konsekuensi moral dari interpretasi tanpa menjadikan preferensi moral sebagai pengganti bukti tekstual dan argumentasi metodologis. Ketiga, tanggung jawab spiritual-praksis, yaitu kesadaran bahwa aktivitas interpretasi merupakan bagian dari amanah pengetahuan yang semestinya berkaitan dengan pembentukan diri dan aktualisasi nilai-nilai wahyu dalam kehidupan.

Ketiga dimensi tersebut membentuk konsep *akuntabilitas interpretatif* sebagai konstruksi analitis yang dikembangkan dalam penelitian ini. Konsep tersebut menempatkan penafsir bukan hanya sebagai produsen makna, tetapi juga sebagai subjek moral yang bertanggung jawab atas cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, penggunaan otoritas interpretatif, serta hubungan antara hasil interpretasi dan kehidupan manusia. Dengan demikian, akuntabilitas interpretatif memperluas evaluasi terhadap penafsiran dari aspek validitas tekstual dan metodologis menuju pertanggungjawaban intelektual, moral, dan spiritual-praktis penafsir.

Kebaruan penelitian ini tidak terletak pada klaim bahwa Ṭāhā telah merumuskan teori etika tafsir secara eksplisit. Kontribusi konseptualnya terletak pada rekonstruksi *al-ʻaql al-mu'ayyad* sebagai kerangka etika normatif-interpretatif bagi pengembangan akuntabilitas subjek dalam interpretasi Al-Qur'an. Melalui rekonstruksi tersebut, penelitian ini memperluas kemungkinan dialog antara filsafat Islam kontemporer dan metodologi tafsir, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara kapasitas rasionalitas, tanggung jawab moral, dan pembentukan diri penafsir.

Kerangka ini juga menegaskan bahwa etika interpretasi tidak seharusnya ditempatkan sebagai pertimbangan tambahan setelah proses penafsiran selesai. Etika melekat dalam keseluruhan aktivitas interpretasi, mulai dari pemilihan sumber dan penggunaan metode, penyusunan argumentasi, perumusan kesimpulan, hingga pengaitan hasil interpretasi

dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab etis bukan sekadar evaluasi terhadap dampak akhir suatu penafsiran, melainkan bagian integral dari proses pembentukan pengetahuan itu sendiri.

Dengan demikian, studi interpretasi Al-Qur'an dapat diperluas dari perhatian yang semata-mata berorientasi pada produksi makna menuju perhatian terhadap pertanggungjawaban atas proses pembentukan dan penggunaan makna. Metode tetap menjadi fondasi epistemik yang penting, tetapi penerapannya membutuhkan subjek yang memiliki integritas intelektual, orientasi moral, dan kesadaran spiritual. Dalam konteks ini, kualitas interpretasi tidak hanya berkaitan dengan ketepatan perangkat metodologis, tetapi juga dengan tanggung jawab penafsir dalam menggunakan pengetahuan yang dihasilkannya.

Pada akhirnya, *al-'aql al-mu'ayyad* membuka kemungkinan untuk memahami penafsir sebagai pemegang amanah pengetahuan. Penafsir bukan pemilik mutlak makna wahyu, melainkan subjek yang bertanggung jawab dalam proses memahami, menjelaskan, dan mengaktualisasikan pesan Al-Qur'an. Pemahaman ini menegaskan bahwa otoritas interpretatif harus selalu disertai kesadaran mengenai keterbatasan manusia dan tanggung jawab atas penggunaan pengetahuan.

Penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka konseptual tersebut melalui analisis terhadap karya tafsir tertentu maupun penelitian empiris mengenai praktik interpretasi. Pengujian tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana ketiga dimensi tanggung jawab epistemik, etis, dan spiritual-praksis dapat dioperasionalkan sebagai perangkat analisis dan evaluasi terhadap karya tafsir kontemporer. Dengan demikian, pengembangan lebih lanjut tidak hanya dapat memperkuat landasan teoretis akuntabilitas interpretatif, tetapi juga memperjelas relevansi dan penerapannya dalam studi Al-Qur'an.

6. DAFTAR PUSTAKA

Abū Zayd, Nasr Ḥāmid. *Critique of Religious Discourse*. Translated by Jonathan Wright. New Haven: Yale University Press, 2006.

Fina, Lien Iffah Naf'atu. "Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12, no. 1 (2011): 159–180. https://doi.org/10.14421/esensia.v12i1.707.

Hallaq, Wael B. *Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha*. New York: Columbia University Press, 2019.

Harvey, Ramon. "Qurʾanic Values and Modernity in Contemporary Islamic Ethics: Taha Abderrahmane and Fazlur Rahman in Conversation." In *Islamic Ethics and the Trusteeship Paradigm: Taha Abderrahmane's Philosophy in Comparative Perspectives*, edited by Mohammed Hashas and Mutaz al-Khatib, 150–169. Leiden: Brill, 2020. https://doi.org/10.1163/9789004438354_009.

Hashas, Mohammed. "Taha Abderrahmane's Trusteeship Paradigm: Spiritual Modernity and the Islamic Contribution to the Formation of a Renewed Universal Civilization of Ethos." *Oriente Moderno* 95, nos. 1–2 (2015): 67–105. https://doi.org/10.1163/22138617-12340077.

Hashas, Mohammed, and Mutaz al-Khatib, eds. *Islamic Ethics and the Trusteeship Paradigm: Taha Abderrahmane's Philosophy in Comparative Perspectives*. Leiden: Brill, 2020.

Ihsannudin, Nurul. "Hadis Akhlak dan Filsafat Etika Taha Abdurrahman: Kritik Modernitas dan Tawaran Alternatif." *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2023). https://doi.org/10.14421/ref.v23i1.3968.

Iqbal, Muhammad. "Konsep I'timaniya dalam Pandangan Taha Abdurrahman." Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2023). https://doi.org/10.24235/jy.v9i1.12891.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Rakhmat, Aulia. “Religion and Reason in Contemporary Islamic Ethics: A Comparative Study of Syed Muhammad Naquib al-Attas and Taha Abderrahmane Thought.” *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 2 (2023): 134–151. https://doi.org/10.32350/jitc.132.09.

Rohmanu, Abid, and Khusniati Rofiah. “Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān’s Philosophical Contribution to Theorize Ethical Maqāṣid.” *Al-Ahkam* 33, no. 2 (2023): 191–212. https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17527.

Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach*. London and New York: Routledge, 2006.

Suleiman, Farid. “The Philosophy of Taha Abderrahman: A Critical Study.” *Die Welt des Islams* 61, no. 1 (2021): 39–71. https://doi.org/10.1163/15700607-00600A10.

Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān. *Al-ʻAmal al-Dīnī wa Tajdīd al-ʻAql*. 2nd ed. Casablanca: al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī, 1997.

Viersen, Harald. “The Modern Mysticism of Taha Abderrahmane.” In *Islamic Ethics and the Trusteeship Paradigm: Taha Abderrahmane’s Philosophy in Comparative Perspectives*, edited by Mohammed Hashas and Mutaz al-Khatib, 170–194. Leiden: Brill, 2020. https://doi.org/10.1163/9789004438354_010.